



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
INTISARI.....	xi
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	18
A. Tinjauan Pustaka.....	18
1. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pidana	18
a. Definisi Perbuatan Melawan Hukum Pidana.....	18
b. Jenis-Jenis Sifat Melawan Hukum Pidana.....	21
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemilu	23
a. Definisi Tindak Pidana Pemilu	23



b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu.....	25
3. Tinjauan Tentang Hukum Pembuktian Pidana.....	30
a. Definisi Hukum Pembuktian.....	30
b. Alat Bukti.....	31
B. Landasan Teori.....	35
1. Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	35
2. Teori Hukum Tindak Pidana Administratif.....	38
3. Teori Kepastian Hukum.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	45
B. Data Penelitian.....	47
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	51
D. Jalannya Penelitian.....	52
E. Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Oleh Majelis Hakim Pada Tindak Pidana Pasal 505 Undang-Undang Pemilu.....	54
1. Putusan-Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri.....	54
2. Analisis Problematika Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim.....	120
a. Ketidakpastian Mekanisme Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal 505 Undang-Undang Pemilu.....	122
b. Disparitas Pembuktian dan Putusan Majelis Hakim.....	130



c. Ambiguitas Penggunaan Alat Bukti Hasil Putusan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Bawaslu.....	146
B. Seharusnya Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Pasal 505 Undang-Undang Pemilu.....	151
1. Sinkronisasi Penyelesaian Pelanggaran Administratif Bawaslu Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Pasal 505 Undang- Undang Pemilu.....	152
2. Revisi Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Penyelenggara Pemilu.....	155
3. Penataan Alur Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum pada Tindak Pidana Pemilu Penyelenggara Pemilu.....	158
BAB V PENUTUP.....	171
A. Kesimpulan.....	171
B. Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA.....	173